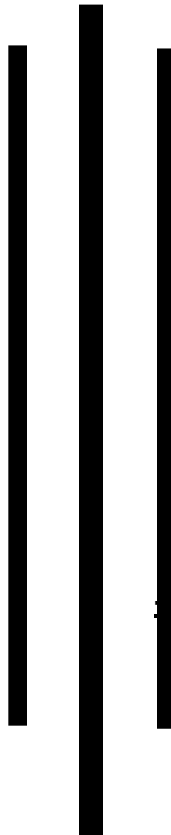




**RENCANA STRATEGIS
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
TAHUN 2025 - 2029**

1



DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
	1. Kondisi Umum.....	1
	2. Kondisi Bidang TIK Polda Kalbar	2
	3. Analisis SWOT.....	5
	4. Permasalahan	8
	a. Bidang SDM	8
	b. Bidang Sarpras	9
II	PENJABARAN VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
	1. Visi Polda Kalbar.....	11
	Visi Bidang TIK Polda Kalbar	11
	2. Misi Polda Kalbar... ..	11
	Misi Bidang TIK Polda Kalbar	12
	3. Tujuan Polda Kalbar	12
	4. Tujuan Bidang TIK Polda Kalbar	12
	5. Sasaran Strategis Polda Kalbar	13
	a. Sasaran Strategis Bidang TIK Polda Kalbar	14
	b. Pentahapan Kebijakan Polda Kalbar	14
	c. Pentahapan Kebijakan Bidang TIK Polda Kalbar	15
III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
	1. Arah dan Kebijakan Strategi Polda Kalbar	17
	2. Arah dan Kebijakan Strategi Bidang TIK Polda Kalbar	23
	3. Kerangka Regulasi	25
IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
	1. Target Kinerja	27
	2. Kerangka Pendanaan.....	28
V	PENUTUP	29
	1. Kaidah Pelaksana	29
	2. Autentikasi dan Distribusi.....	30

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Nomor: Kep/08/VI/2025
tentang

RENCANA STRATEGIS
BIDANG TIK POLDA KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

SATKER BIDANG TIK POLDA KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalbar, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Rencana Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalbar T.A. 2025;
3. Surat Perintah Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalbar Nomor: Sprin/256/XII/REN.2.3./2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Kelompok Kerja Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalbar.
- Memperhatikan: penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalbar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 SATUAN KERJA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA KALBAR.
1. Rencana Kerja Bidang TIK Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 2. Rencana Kerja Bidang TIK Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 berlaku untuk Sub-sub Satuan Kerja Bid TIK Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sesuai lingkup tugas, fungsi dan peranannya.

3. Keputusan.....

KEPUTUSAN KABID TIK POLDA KALBAR
NOMOR : KEP/08/XII/2025
TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal: 29 DESEMBER 2025

KEPALA BIDANG TIK POLDA KALBAR



YANI PERMANA, S.I.K, M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79010777

Tembusan:

1. Kapolda Kalbar.
2. Irwasda Polda Kalbar.
3. Karorena Polda Kalbar.

RENCANA STRATEGIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai bagian dari alat negara, Polda Kalbar dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJMN dan RPJMD. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polda Kalbar juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah

kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, Renstra Polda Kalbar ini menjadi acuan penyusunan Renja Polda, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polda, kemudian diturunkan keseluruh Satker Polda dan jajaran.

Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri tetap dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan strategis. Potensi dan permasalahan Polda Kalbar yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Polda Kalbar.

Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia melaksanakan Konferensi pers tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Polri menindaklanjuti dengan melakukan persiapan-persiapan yaitu menyusun rencana pemindahan Mabes Polri yang meliputi personel, Faskon, Almatsus, konsep Smart Security dalam Smart City yang merupakan konsep Ibu Kota Negara baru beserta kebutuhan anggarannya. Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga mempersiapkan cipta kondisi dan pengamanan sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan terkendali serta tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Pada tahun 2024 Polri telah siap secara administratif dan operasional melaksanakan tugas di Ibu Kota Negara Baru.

Terkait pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, maka Polda Kalimantan Barat harus mempersiapkan sedini mungkin terutama yang berkaitan dengan administratif operasi

2. Kondisi Bidang TIK Polda Kalbar

Tahun 2025 merupakan tahun ke Empat dari Tahapan Rencana Strategis Polri 2025-2029 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polri T.A. 2024 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polri T.A. 2025. Rencana Kerja Polri T.A. 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polri 2025-2029. Rencana Kerja Polri T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu pemantapan kesejahteraan masyarakat

dan pelayanan publik, yang terdiri dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas, percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi dan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana Terorisme, Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat, akan dijadikan masukan perbaikan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Rencana Kerja Bidang TIK Polda Kalbar TA. 2025 adalah merupakan penjabaran dalam melaksanakan tugas di Bidang TIK sesuai dengan Perpol Nomor 14 tahun 2018 yang dalam implementasinya harus dapat memberikan kontribusi pelayanan sampai pada komunitas terkecil di tingkat Polsubsektor / Pospol dalam rangka mewujudkan pelayanan kamtibmas prima.

Bidang TIK Polda Kalbar T.A. 2025 akan melaksanakan **1 Program** dan **2 kegiatan** Polri guna mendukung kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat maupun memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta tidak diskriminatif dan selalu menjunjung tinggi HAM dan penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang ***Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah***, sebagai pengganti dari Keputusan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 , Bidang TIK Polda Kalbar dipimpin oleh Kabid TIK Polda Kalbar yang bertugas memimpin dan melaksanakan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi seluruh jajaran Polda Kalbar serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda Kalbar. Kabid TIK Polda Kalbar sebagaimana dimaksud diatas, merupakan unsur pimpinan pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalbar yang berkedudukan dibawah Kapolda dan bertanggung jawab kepada Kapolda Kalbar serta dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda Kalbar. Dalam perkembangan dan pelaksanaan serta pengendalian khususnya di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kabid TIK dibantu oleh :

a. Subbag Perencana dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin dipimpin oleh Kasubbagrenmin yang bertugas menyusun Perencanaan Program kerja dan anggaran, manajemen sarana dan prasarana, Personel, mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam lingkungan Bidang TIK. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, rancangan renja, renja, kebutuhan sarpras , personel, dan anggaran;
- 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- 3) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan , pengendalian pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- 5) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
- 6) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis terget pencapaian kinerja, program, dan anggaran;
- 7) Kasubbagrenmin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabid TIK Polda Kalbar.

Dalam Pelaksanaan tugas, Kasubbagrenmin dibantu oleh :

- a) Kepala Urusan Perencanaan (Kaurren);
- b) Kepala Urusan Administrasi (Kaurmintu);
- c) Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu);
- d) Perwira Admininstrasi (Pamin); dan
- e) Bantuan Umum (Banum).

b. Subbidang Teknologi dan Komunikasi (Subbid Tekkom)

Subbid Tekkom dipimpin oleh Kasubbid Tekkom yang bertugas :

- 1) Membantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kabid TIK Polda Kalbar, memberikan arahan dalam hal perumusan dan pengembangan sistem dan metoda, pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan fungsi Teknologi Komunikasi dan Informasi Kepolisian sesuai batas kewenangan yang ada padanya;
- 2) Pembinaan sistem dan teknologi informasi di lingkungan polda;
- 3) Pemeliharaan dan perbaikan Alat Komunikasi (Harakan ALkom) data dan jaringan;
- 4) Pembangunan dan pengembangan jaringan yang mencakup intranet dan internet, serta pengelolaan domain polda;
- 5) Pelayanan dukungan teknis di bidang sistem dan teknologi informasi kepada jajaran polda; dan
- 6) Memberikan saran dan masukan kepada Kabid TIK mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dan informasi.

Dalam Pelaksanaan tugas, Kasubbid Tekkom dibantu oleh :

- a) Kepala Urusan Jaringan Komunikasi (Kaur Jarkom);
- b) Kepala Urusan Pelayanan Komunikasi (Kaur Yankom);
- c) Kepala Urusan Pemeliharaan dan Perbaikan (Kaur Harkan);
- d) Perwira Urusan Jaringan Komunikasi (Paur Jarkom);
- e) Perwira Urusan Pelayanan Komunikasi (Paur Yankom);
- f) Perwira Urusan Pemeliharaan dan Perbaikan (Paur Harkan); dan
- g) Bantuan Umum (Banum).

c. Subbidang Teknologi Informasi (Subbid Tekinfo)

Subbid Tekinfo dipimpin oleh Kasubbid Tekinfo yang bertugas :

- 1) membantu urusan sarana prasarana, pengumpulan dan pengolahan data, membantu urusan penyajian Informasi dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan di lingkungan Polda membantu urusan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perangkat lunak komputer serta pelayanan multimedia yang sesuai dengan batas kewenangannya;
- 2) memimpin semua kegiatan yang berkaitan dengan informasi, pengolahan dan pengumpulan data dan pelayanan multimedia;
- 3) bekerjasama dengan pegemban tugas fungsi administrasi pada satuan lain secara vertikal maupun horizontal;
- 4) pembinaan dan pengembangan hardware dan software komputer serta pelayanan multimedia;
- 5) melaporkan hasil kegiatan perencanaan dan administrasi komunikasi dan elektronika kepada Kabid TIK Polda Kalbar; dan
- 6) memberikan saran dan masukan kepada kabid TIK mengenai hal-hal yang berhubungan dengan informasi, pengolahan dan penyajian data.

Dalam Pelaksanaan tugas, Kasubbid Tekinfo dibantu oleh :

- a. Kepala Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data (Kaur Pullahta);
- b. Kepala Urusan Infrastruktur Teknologi Informasi (Kaur Inti);
- c. Kepala Urusan Pelayanan DukunganTeknis (Kaur Yanduknis);
- d. Perwira Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data (Paur Pullahta);
- e. Perwira Urusan Infrastruktur Teknologi Informasi (Paur Inti);
- f. Perwira Urusan Pelayanan DukunganTeknis (Paur Yanduknis); dan
- g. Bantuan Umum (Banum).

3. Analisis SWOT

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Polda Kalbar. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimantan Barat dan perlu penanganan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan Polda Kalbar. Dari perkembangan dan perubahan lingkungan strategis di Kalimantan Barat tersebut diatas dilakukan analisa SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats), yaitu:

a. Kekuatan

- 1) Bidang TIK Polda Kalbar pada bulan Januari 2025 sebanyak 44 orang, dan sebagian SDM telah memiliki kompetensi teknis;
- 2) Bidang TIK Polda Kalbar memiliki Sarpras yang memadai dengan spesifikasi teknis berteknologi standar internasional;
- 3) Adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan penyedia layanan jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi;
- 4) Dukungan Anggaran sudah mengakomodir operasional tugas Bid TIK;
- 5) Tersedianya SOP penggunaan Alkom dan pelayanan Bid TIK.

b. Kelemahan

- 1) kuantitas personel pengemban tugas fungsi teknologi informasi dan komunikasi dengan jenjang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan seperti strata 1 teknik informatika dan elektronika jumlahnya belum memenuhi standar kebutuhan dan umumnya personel TIK tidak memiliki dasar pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan bertugas sebagai staf administrasi;
- 2) masih terbatasnya Ranmor inventaris Bid TIK yang bisa digunakan untuk menuju daerah yang geografisnya sulit dijangkau dengan ranmor biasa;

3). masih

- 3) masih terbatasnya Alkom dan Almon Bidang TIK yang dimiliki sehingga tidak bisa memaksimalkan perbaikan dan monitoring;

c. Peluang

- 1) penggelaran jumlah site repeater dan sistem komunikasi radio sudah sesuai dengan luas dan kondisi geografis satuan kewilayahan;
- 2) Alkom pada Satker Mapolda Kalbar berupa Alkom SISPAMKOTA;
- 3) dalam kecepatan bertindak unit-unit polri yang bergerak di lapangan harus segera di dukung oleh sistem komunikasi data nirkabel guna dapat mengakses data yang diperlukan dan tersimpan di pusat data;

d. Ancaman

- 1) secara geografis wilayah Kalbar mayoritas merupakan daerah datar sehingga di khawatirkan adanya propagasi frekuensi yang mengakibatkan terjadinya hambatan sehingga menghambat dalam penggelaran membangun Lynksystem;
- 2) Pengguna Frekwensi dan alat komunikasi yang tidak sesuai dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan sehingga pendataan spktrum frekwensi radio sebagai sumber data tidak akurat;
- 3) Terjadinya interfrensi/ saling ganggu yang disebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan frekwensi yang mengakibatkan dan ancaman keselamatan jiwa manusia.

4. Permasalahan

a. Bidang Sumber Daya Manusia

- 1) Kuantitas personel pengemban tugas fungsi teknologi informasi dan komunikasi dengan jenjang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan seperti strata 1 (S1) teknik informatika dan elektronika jumlahnya belum memenuhi standar kebutuhan dan umumnya personel TIK tidak memiliki dasar pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan bertugas sebagai staf administrasi;
- 2) kemampuan personel TIK baik polri maupun pns yang ditempatkan di TIK tidak memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, hanya sebatas mengoperatori perangkat yang tergelar,

sebagian kecil personel TIK Polda yang mempunyai kemampuan/kualifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi data berbasis ip,

- 3) personel pengemban fungsi TIK belum memiliki kualifikasi di bidang pengamanan jaringan (***security network***); dan
- 4) kegiatan kajian dan riset di bidang TIK khususnya komplek sampai saat ini tidak dilaksanakan.

b. Bidang Sarana dan Prasarana

1) Sistem Komunikasi Radio :

- a) jumlah repeater belum memenuhi coverage area suatu wilayah dan jangkauan repeater relatif pendek karena menggunakan frekuensi 800 mhz;
- b) pembangunan yang tidak konsisten sistem yang digunakan sering berubah-ubah;
- c) suku cadang tidak tersedia di Indonesia sehingga pengadaan suku cadang terkendala;
- d) sistem link cenderung menggunakan vpn-ip yang disediakan oleh pihak ketiga dengan biaya tinggi;
- e) campur tangan pihak ketiga sangat kental dengan pemilihan sistem dan peralatan radio Polri; dan
- f) pembangunan tidak disertai dengan pembangunan tower terjadi kendala dalam penempatan repeater.

2) Sistem Komunikasi Data :

- a) sudah tergelar jaringan komunikasi data vpn-ip hingga satuan Polres dan Polsek-Polsek belum memiliki sistem komunikasi data;
- b) sudah tergelar jaringan internet namun sebatas satuan Polres dan Polsek-Polsek pada umumnya belum tergelar;
- c) infrastruktur komunikasi data dan video (jaringan multimedia) sudah tergelar hingga satuan Polres;
- d) layanan Polri Call Center 110 sudah terbangun pada satuan Polres namun belum ke seluruh Polres terbangun; dan
- e) Tergelarnya perangkat Command Center (CC) Polda Kalbar dan Polres Jajaran sebagai fasilitas pendukung Harkamtibmas.

BAB II

PENJABARAN VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis *SWOT* sebagaimana disebutkan di atas, Polda Kalbar menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Visi Polda Kalbar:

Visi Polda Kalbar mengacu pada visi Polri yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2029, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan Melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

- a. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
- b. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang tertib.

Visi Bidang TIK Polda Kalbar:

Terwujudnya Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta penyajian Informasi Kamtibmas dan Pelayanan Multimedia

2. Misi Polda Kalbar:

Mengacu pada misi Polri, maka misi Polda Kalbar sampai dengan tahun 2029, yaitu:

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polda Kalimantan barat”.

Makna: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Kalimantan Barat serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

Misi Bidang TIK Polda Kalbar:

- 1) Melaksanakan pembangunan system dan metode, materil, dan fasilitas yang berbasis dengan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung tugas operasional;
- 2) Meningkatkan etika profesi, gairah kerja dan disiplin dengan menerapkan system reward and punishment;
- 3) Meningkatkan kemampuan personel dengan mengikut sertakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan komunikasi dan irformatika;
- 4) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi, baik secara verikal maupun horizontal.

3. Tujuan Polda Kalbar :

Tujuan Polda Kalbar dalam kurun waktu lima tahun perencanaan (2025-2029) yaitu Berdasarkan visi dan misi Polri, maka tujuan Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;
- b. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- c. meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Kalbar agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;

d. membangun.....

- d. membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang lebih profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- e. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

4. Tujuan Bidang TIK Polda Kalbar :

- a. Menguasai Teknologi dan Informatika dan mengimplementasikan dalam tugas Polri di lapangan;
- b. Meningkatkan kemampuan personil di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan pelayanan pengguna alat komunikasi dan data;
- c. Memperluas jaringan komunikasi hingga ke Polsek - Polsek dalam rangka Komando kendali dan informasi;
- d. Mewujudkan Polda sebagai Pusat Komunikasi, Komando, Kendali dan Informasi;
- e. Membangun system informasi, pengelolaan serta penyajian data yang mampu mendukung kebutuhan pengguna;
- f. Membangun jaringan komunikasi perbatasan dalam rangka mendukung patroli pengamanan perbatasan Indonesia dan Malaysia;
- g. Mengimplementasikan system manajemen Kepolisian yang profesional melalui antara lain :
 - 1) Manajemen administrasi, keuangan dan anggaran yang akuntable, transparan,efisien, dan lancar;
 - 2) Manajemen sumber daya manusia yang mahir, terpuji dan patuh hukum;
 - 3) Meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan di semua tingkat satuan dan fungsi.

5. Sasaran

5. Sasaran Strategis Polda Kalbar:

Adapun Sasaran Strategis Polda Kalbar Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- b. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
- c. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal;
- d. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- e. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Polda Kalbar Tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Polda Kalbar yang akan dicapai ditahun 2029.

6. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis Polda Kalbar

Keterkaitan sasaran impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel”, Tujuan dan Sasaran Strategis Polda Kalbar.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;	1. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan;
2. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme	2. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan
3. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polda Kalbar yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan	3. pengembangan dan pengelolaan SDM Polda Kalbar yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
4. tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif	4. infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern
5. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	5. tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel

a. Sasaran Strategis Bidang TIK Polda Kalbar, yaitu :

Infrastruktur Strategis Kepolisian yang berdaya guna dan modern, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Persentase Terpeliharanya sarana prasarana Bidang TIK;
- 2) Persentase pemenuhan Jasa Telekomunikasi Satker Mapolda Kalbar;
- 3) Terselenggaranya pembinaan pada Satker dan Satwil jajaran Polda Kalbar terkait **Indeks SPBE** dan **Indeks Kualitas data**.

b. Pentahapan Kebijakan Polda Kalbar

1) Tahun 2025

Melanjutkan pelayanan publik Polda Kalbar yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2) Tahun 2026

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Alamsus Polri yang modern;

3). Tahun 2027.....

3) Tahun 2027

Memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun 2028

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

5) Tahun 2029

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Kalbar.

c. Pentahapan Kebijakan Bidang TIK Polda Kalbar

1) Tahun 2025

- a) Peningkatan pelayanan informasi dan data, pembangunan jaring Komunikasi dari tingkat Polres sampai Polsek.
- b) Pembangunan Jaring Komunikasi perbatasan dan pulau terluar;
- c) Pembangunan Pengamanan IT;
- d) Peningkatan Kemampuan personel TIK Polda Kalbar dan jajaran;
- e) Peningkatan Kerja sama Bidang IT;

2) Tahun 2026

- a) Peningkatan pelayanan informasi dan data, pembangunan jaring Komunikasi dari tingkat Polres sampai Polsek
- b) Revitalisasi perangkat Video Conference Polda Kalbar dan jajaran;
- c) Peningkatan kualitas jaringan Data Polda Kalbar dan Polres jajaran;
- d) Peningkatan Kemampuan personel TIK Polda Kalbar dan jajaran;
- e) Peningkatan Kerja sama Bidang IT;

3) Tahun 2027

- a) Pembangunan lanjutan Jaring komunikasi Radio dan Data Polda Kalbar dan Polres jajaran;
- b) Lanjutan Revitalisasi perangkat Video Conference Polda Kalbar dan jajaran;
- c) Lanjutan peningkatan kualitas jaringan Data Polda Kalbar dan Polres jajaran;
- d) Peningkatan Kemampuan personel TIK Polda Kalbar dan jajaran;
- e) Peningkatan Kerja sama Bidang IT;

4) Tahun 2028

- a) Pembangunan lanjutan Jaring komunikasi Radio dan Data Polda Kalbar dan Polres jajaran;
- b) Termonitornya seluruh Objek Vital Polda Kalbar dan Polres jajaran melalui CCTV yang sudah tergelar di Command Center Polda Kalbar;
- c) Peningkatan Kemampuan personel TIK Polda Kalbar dan jajaran;
- d) Peningkatan Kerja sama Bidang IT;

5) Tahun 2029

- a) Pembangunan lanjutan Jaring komunikasi Radio dan Data Polda Kalbar dan Polres jajaran;
- b) Termonitornya seluruh Objek Vital Polda Kalbar dan Polres jajaran melalui CCTV yang sudah tergelar di Command Center Polda Kalbar;
- c) Peningkatan Kemampuan personel TIK Polda Kalbar dan jajaran di bidang operasionalisasi pengamanan data (Big Data);
- d) Peningkatan Kerja sama Bidang IT;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar

a. Sasaran strategis “**Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) peningkatan kehadiran Polri pada 11 Lokasi prioritas dan 4 PLBN (Pos Lintas Batas Negara);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi prioritas dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara).
 - b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).
- 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - b) melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya.
 - e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.
- 3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
 - b) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara;

4) peningkatan

- 4) peningkatan keamanan Laut;
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda.
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.
- 7) melaksanakan “Efektifitas Operasional” kegiatan operasional Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) mengelola

- (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralkan berita negatif (*hoax*) yang dapat mengganggu Kamtibmas;
- c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
 - (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.
- b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Adil**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - c) meningkatkan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.
 - e) serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan

hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

f) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*).

2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polda dan jajaran dan aparat penegak hukum;
- b) standardisasi data kriminal;
- c) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.

3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
- b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

c. Sasaran strategis **“Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas secara terpadu dan Optimal”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan kualitas SDM Polda Kalbar untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

- a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
- b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;

- c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
 - d) meningkatkan kesejahteraan SDM.
- 2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 melakukan pendataan personel Polda Kalbar guna mengantisipasi permintaan Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru.
- d. Sasaran strategis **“Tata Kelola yang Bersih, Transfaran dan Akuntabel”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan **“Layanan Publik Polri yang Prima”**:
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik;
 - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal melalui akses yang mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (*Janji Presiden*)
 - b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek;
 - 3) melaksanakan **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalbar.

untuk

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

- (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar;
- (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Kalbar.

- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan adalah:

- (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Kalbar;
- (2) menyusun LKIP Polda Kalbar.

- 4) Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a) penguatan regulasi Polri

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

- (1) memperkuat kerangka regulasi Polda Kalbar;
- (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

- b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
- (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang TIK Polda Kalbar

Mendasari arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar, Bid TIK Polda Kalbar menentukan Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

a. Sasaran strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang berdaya guna dan modern” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1) modernisasi Sarana dan Prasarana Polda Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
- 2) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2025 - 2029;
- 3) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polda Kalbar;
- 4) membangun *Big Data/Single Data Entry* Polda Kalbar;

b. Sasaran strategis “Sistem pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”:
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 2) meningkatkan inovasi pelayanan publik;
- 3) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal melalui akses yang mudah;
- 4) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 5) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
(*Janji Presiden*)
 - b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek;

c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan “**Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - (a) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar;
 - (b) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan review anggaran Polda Kalbar.
 - 2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan adalah:
 - (a) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Kalbar;
 - (b) menyusun LKIP Polda Kalbar.
- d. Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) penguatan regulasi Polri
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - (a) memperkuat kerangka regulasi Polda Kalbar;
 - (b) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.
 - 2) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (c) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

3. Kerangka Regulasi

Polri dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polda Kalbar yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polda Kalbar selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Polda Kalbar. Kerangka regulasi pada Renstra Polda Kalbar berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polda Kalbar yang bersifat mengikat kepada personel Polda Kalbar maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polda Kalbar tahun 2025-2029 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Sistem		Kabid TIK		- Penkajian teknis terhadap rencana pembangunan dan pengembangan Siskomlek Polri.

	Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian				- Pembinaan Teknis serta Anev Siskomlek Polri. - Pemetaan Infrastruktur Jarkom Radio dan Telepon - Pelayanan sentral Komunikasi - Pembinaan sistem dan metode dengan menyiapkan penyusunan Juknis dan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kepolisian untuk operasional Siskomlek.
2	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110.		Kabid TIK		Layanan Polisi 110 Kode Akses Tunggal Panggilan Darurat Bantuan Kepolisian
3	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat pengendali Command Center.		Kabid TIK		Layanan Vicon / Command Center, digunakan untuk koordinasi Interaktif Multimedia dari Mabes Polri hingga Satuan Wilayah.
4	Peraturan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola E-mail Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kabid TIK		

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dalam mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat khususnya Satker Bid TIK Polda Kalbar menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IK PENUNJANG							
Innovation							
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang berdaya guna dan Modern	Persentase Terpeliharanya Sarana prasarana Bidang TIK	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jasa Telekomunikasi Satker Mapolda Kalbar:	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA PENUNJANG (IKP) BID TIK POLDA KALBAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang berdaya guna dan Modern	Indeks SPBE	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7
		Indeks Kualitas Data	4	4	5	5	5

Bid TIK

Bid TIK Polda kalbar sebagai satker Pembina fungsi mempunyai 1 (satu) Sasaran Strategis, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja, penjelasan sebagai berikut:

Infrastruktur Strategis Kepolisian yang berdaya guna dan Modern: meliputi

a) Indeks SPBE;

b) Indeks Kualitas Data.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 2 Program di lingkungan Bid TIK Polda Kalbar , yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1.	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang berdaya guna dan Modern	1. Mengusulkan kebutuhan minimal/ iideal alat materiil khusus (Almatsus) Polda Kalbar yang modern;	RM	
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quickwins</i> ;	RM	
		2. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;	RM	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bidang TIK Polda Kalbar dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Bid TIK Polda kalbar. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh personel Bid TIK Polda Kalbar sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Bid TIK Polda Kalbar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban Kalimantan Barat dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. memberikan bimbingan teknis dalam rangka Penyelenggaran dan merealisasikan program Komunikasi dan Informasi Kepolisian untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap perkembangan teknologi sesuai dengan perkembangan jaman sekarang pengawasan dan pengendalian Alkomlek agar tercapai efektifitas dan efesiensi serta produktifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri khususnya Polda Kalbar.

2. Autentikasi

2. Autentikasi dan distribusi

Autentifikasi, Renstra Bid TIK Polda Kalbar merupakan jabaran dari Renstra Polda Kalbar dan disahkan oleh Kabid TIK Polda Kalbar sebagai pimpinan sekaligus sebagai penanggung jawab program dan anggaran

Ditetapkan di: Pontianak

pada tanggal: 24 Desember 2025

KEPALA BIDANG TIK POLDA KALIMANTAN BARAT



YANI PERMANA, S.I.K, M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79010777